

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya laki-laki dan perempuan berbeda dalam dua hal, yang pertama secara biologis di lihat dari unsur biologis dan anatomi tubuh. Laki-laki memiliki penis, testis, jakun, memproduksi sperma dan ciri-ciri biologis lainnya yang berbeda dengan biologis perempuan. Sementara perempuan mempunyai alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur (indung telur), vagina, mempunyai payudara dan air susu dan alat biologis perempuan lainnya sehingga bisa haid, hamil dan menyusui atau yang disebut dengan fungsi reproduksi. Alat-alat yang di miliki laki-laki dan perempuan tersebut merupakan atribut yang melekat pada setiap manusia selamanya dan fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Alat-alat tersebut bersifat permanen, tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan (kodrat) (Narwoko dan Suyanto, 2007: 334).

Sedangkan yang kedua secara gender dilihat dari perbedaan peran dan status yang diberikan dalam masyarakat. Dimana laki-laki mempunyai peran *maskulin* yaitu, sifat yang diperuntukkan bagi laki-laki yang diharapkan keras, kuat, rasional, gagah dan perkasa (Narwoko dan Suyanto, 2007: 334). Budaya (*culture*) menempatkan peran laki-laki berstatus dan mempunyai hak lebih dibandingkan perempuan, seperti budaya patriarki yang di anut dalam masyarakat ([anthropologymeetssomething.tumblr/](http://anthropologymeetssomething.tumblr/) di akses tgl 13 September 2014). *Instrumental role*, yaitu peran yang diharapkan dari laki-laki untuk lebih objektif, agresif, atletis berkonsentrasi terutama pada karir dan melaksanakan tugas yang mengalami persaingan dalam mencari nafkah keluarga (George dan Goodman, 2007: 410). *Bread winner*, yaitu peran yang diharapkan sebagai orang yang mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada dalam keluarga ([www.academia.edu/](http://www.academia.edu/) di akses pada tgl 13 September 2014). *Public* (umum) merupakan peran yang diharapkan laki-laki untuk bekerja

di luar rumah. Pemimpin (*leader*) yaitu peran yang diharapkan dari laki-laki sebagai orang yang mengatur dan memberikan arahan maupun materi untuk anggota keluarga sehingga laki-laki memiliki posisi penting dalam sebuah keluarga (Populasi, Tahun 1993: 38-39).

Perempuan memiliki peran *feminim* yaitu sifat yang diperuntukkan bagi perempuan yang diharapkan halus, lemah, perasa, sopan, penakut (Narwoko dan Suyanto, 2007: 334). *Nature* (alami) adalah sifat feminim yang melekat pada perempuan (pengasuh, penerima dan pemelihara) sebagai sifat alami perempuan agar perempuan dapat berperan sebagai ibu dan berperan di dalam rumah (Megawangi, 1999: 113). *Expressive role*, yaitu peran perempuan yang lebih perasa, emosional dan empati. dengan sifat dan peran tersebut perempuan berada di dalam rumah (*domestic*) untuk mengasuh anak dan mengurus semua pekerjaan rumah tangga (George dan Goodman, 2007: 408-409). Kemudian mengikuti semua keputusan dan aturan yang di buat laki-laki di dalam rumah yaitu sebagai *follower* (pengikut) sehingga pada saat perempuan bekerja dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya dianggap sebagai *secondary earner* (pelengkap) atau penunjang ekonomi keluarga (Populasi, Tahun 1993: 90-91). Perbedaan peran di atas di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Peran Menurut Jenis Kelamin**

No.	Laki-laki	Perempuan
1	Maskulin	Feminim
2	Culture	Nature
3	Instrumental role	Expressive role
4	Breadwinner	Secondary earner
5	Public	Domestic
6	Leader	Follower

*Sumber: Populasi, Tahun 1993: 38.*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memainkan peran dan memiliki nilai yang yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mosse (2004: 58) bahwa kerja perempuan di rumah tangga tidak menghasilkan pendapatan yang nyata, tidak mengenal jenjang karir dan di nilai rendah. Hal di atas disahkan oleh

berbagai pranata dan lembaga sosial yang kemudian menjadi fakta sosial tentang status-status dan peran-peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan (Abdullah, 2003: 4).

Akibat gender di atas, laki-laki menempati posisi di depan sedangkan perempuan di belakang. Oleh karena hal tersebut perempuan menghadapi hambatan diskriminasi yang disebabkan oleh posisi kelasnya, laki-laki menjadi dominan kemudian perempuan menjadi subordinat karena budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat dan diskriminasi yang disebabkan oleh jenis kelaminnya menyebabkan perbedaan peran dan status sehingga perempuan mendapatkan berbagai permasalahan diantaranya diperkerjakan secara murah dan mendapatkan kekerasan (Ihromi, 1995: 4). Dengan demikian, untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan di atas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan sedunia pada tahun 1975 di Meksiko dengan mengeluarkan konsep pembangunan berbasis perempuan yakni Perempuan dalam Pembangunan (*Women In Development* atau *WID*) kemudian berganti dengan Perempuan dan Pembangunan (*Women and Development* atau *WAD*) selanjutnya berganti dengan Gender dan Pembangunan (*Gender And Development* atau *GAD*) yang diharapkan dapat meningkatkan korelasi positif antara laki-laki dan perempuan (Nugroho, 2008: 10).

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengintegrasikan perempuan terlihat pada Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak dan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, pemerintah mengadopsi konsep pembangunan gender dalam perjuangan kesetaraan perempuan terhadap laki-laki sejak Kabinet Pembangunan V dan ditingkatkan dalam Kabinet Pembangunan VI kemudian mendapat perhatian tinggi pada Kabinet Reformasi dimana pemerintah mengeluarkan Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (Nugroho, 2008: 11). Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional telah memberikan instruksi

kepada semua pemangku kepentingan atau pengambil keputusan baik di pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender yaitu kebutuhan, pengalaman, permasalahan perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki kedalam setiap penyusunan kebijakan dan program di kementerian atau lembaga daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi sehingga perempuan dan laki-laki termasuk anak dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil dan merata.

Hal ini diperkuat kembali melalui Peraturan Presiden (PerPres) No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mencantumkan bahwa PUG adalah strategi nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah dengan strategi *Good Governance* yang berkelanjutan (Surjadi dkk, 2010:58-59). Untuk mendukung terlaksananya *Good Governance* sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka pada Agustus tahun 2010 dikeluarkannya *Millennium Development Goals (MDG)* yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan dengan delapan area pengamatan yang salah satunya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan (MDG3) (Surjadi dkk, 2010: 19).

Berdasarkan konsep pembangunan di atas maka perempuan memasuki area publik yang terlihat pada persentase tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan pada tahun 2011, yaitu 52,44% yang sebelumnya pada tahun 2008 berjumlah 51,10%. Dari data tersebut dapat di lihat bahwa terjadinya peningkatan tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan (<http://www.menegpp.go.id/> di akses tgl 2 april 2014).

Di Sumatera Barat tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan pada tahun 2011 tenaga kerja perempuan mengalami penurunan, dimana perempuan 872.762 orang. Sedangkan pada tahun 2012 berjumlah perempuan 842.664 orang ([bkpmp.sumbarprov.go.id](http://bkpmp.sumbarprov.go.id) di akses tgl 2 april 2014).

Berdasarkan data di atas, penurunan tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan tersebut disebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia hanya diperuntukkan oleh laki-laki dan hanya sedikit pekerjaan yang diperuntukkan oleh perempuan. Itu pun pekerjaan yang di dapat tidak terlepas dari ruang domestik perempuan. Lapangan pekerjaan yang ada dipengaruhi oleh konstruksi sosial perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat, dimana pekerjaan yang tersedia untuk perempuan hanya sebagai perpanjangan tangan dari sektor domestik, seperti perawat, juru terlatih dan pelayanan di dominasi oleh perempuan (Ollenburger dan Moore, 2002: 96).

Namun berbeda yang terjadi pada pekerjaan jasa perlindungan keamanan di Kota Padang, yaitu Satpol PP Kota Padang mulai menerima perempuan. Satpol PP di Kota Padang berdiri pada tahun 1999. Pekerjaan yang mengawasi dan menertibkan perempuan Tuna Susila, Pedagang Kaki Lima (PKL), pengunjung rasa, pengemis, pengamen, anak jalanan yang beroperasi di lampu merah dan pengamanan fasilitas-fasilitas vital pemerintah daerah Kota Padang sesuai Perda No. 11 Tahun 2005. Pelaksanaan pekerjaan Satpol PP di lapangan memiliki resiko kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat, dimana sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap Perda tersebut.

Satpol PP Kota Padang memiliki jumlah pegawai yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Satpol PP tahun 2013**

No.	PNS		Kontrak	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
	99	8	187	24
Jumlah	107		211	

*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Padang*

Tabel di atas menunjukkan jumlah pegawai Satpol PP, dimana terdapat 8 PNS perempuan yang bekerja sebagai staff Subag Tata Usaha berjumlah 5 orang, 1 orang sebagai

Staff Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban (Trantib), 1 orang sebagai Staff Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan 1 orang sebagai Staff Pengembangan Kapasitas (Bangtas). Kemudian 24 perempuan pegawai kontrak yang bekerja sebagai staff Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) berjumlah 2 orang, 1 orang sebagai staff Pengembangan Kapasitas (Bangtas), 3 orang sebagai staff Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (P3HD), 2 orang sebagai anggota Intel, 8 orang sebagai anggota Elang dan 8 orang sebagai anggota Cendrawasih.

Di bawah ini tabel nama-nama perempuan yang bekerja di Satpol PP Kota Padang sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Nama Perempuan Bekerja di Satpol PP**

No.	PNS	Kontrak	
		2012	2014
1	Mira Fitria, S.S	Melani, SH	Lola Manurizal
2	Mira Idriani, A.Md	Mutiara Sidiqia S	Rinche Acniesa
3	Edawati	Novra Saputri	Winda Zikri
4	Yunaida	Chrisistina Teluk	Nola Marta
5	Landra Machdalena	Rista Delia	Sherly Jayanti
6	Fatmawati	Ivani Pratiwi	Elfalindra Delita
7	Dewi Satria	Nurhidayati	Salvina
8	Elva Deswan	Ega Elfia	Septia Aminati
9		Winda Rahayu	Agnes Dwinata
10		Indah Mentari	Silvia ZM
11			Laila Fitria
12			Elsa Vyani Irawan
13			Desya
14			Yuriza Pamela Anggraini

*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Padang*

Tabel di atas menunjukkan terdapat 24 perempuan bekerja sebagai anggota Satpol PP pada bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum yang turun kelapangan. Keikutsertaan mereka telah berlangsung di mulai pada tahun 2012 berjumlah 10 orang yang sebelumnya pada bagian ini perempuan belum pernah diikuti kemudian pada tahun 2014 di rekrut kembali perempuan dalam Satpol PP berjumlah 14 perempuan. Di sisi lain, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang rentan dengan kekerasan yang berhadapan langsung dengan kerumunan massa yang sewaktu-waktu tidak terkendali. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji tentang alasan instansi Satpol PP melibatkan perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian ketertiban umum di Kota Padang.

Dari fenomena di atas menarik diteliti karena penelitian ini menjelaskan pekerjaan perempuan dalam sektor publik yaitu instansi Satpol PP pada bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Kota Padang menunjukkan suatu kemajuan yang diinginkan dalam kesetaraan berdasarkan konsep pembangunan untuk menghindari diskriminasi atau menjelaskan kemunduran bagi perempuan dalam pekerjaan di sektor publik yaitu Satpol PP.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Kebijakan pembangunan dengan mengintegrasikan perempuan telah membuka peluang perempuan untuk dapat bekerja di sektor publik. Khususnya di Sumatera Barat perempuan telah bekerja pada pekerjaan jasa pengamanan kota yaitu Satpol PP Kota Padang. Satpol PP Kota Padang menerima perempuan pada bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum. Keikutsertaan mereka telah berlangsung semenjak tahun 2012.

Namun, pekerjaan pada bagian ini merupakan pekerjaan yang rentan dengan kekerasan yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang sewaktu-waktu tidak terkendali karena menentang Perda No. 11 Tahun 2005. Oleh sebab itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: ***“Mengapa instansi Satpol PP Merekrut Perempuan dalam Bagian Pengawasan Dan Pengendalian Penertiban Umum Di Kota Padang?”***.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Tujuan Umum**

Mendeskripsikan rekrutmen perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Satpol PP di Kota Padang.

#### **2. Tujuan khusus :**

1. Mendeskripsikan alasan instansi Satpol PP merekrut perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum di Kota Padang.
2. Mendeskripsikan cara kerja perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Satpol PP di Kota Padang.

### **1.4. Manfaat penelitian**

#### **1.4.1. Bagi Aspek Akademis**

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi Gender.

#### **1.4.2. Bagi Aspek Praktis**

Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

### **1.5. Tinjauan pustaka**

#### **1.5.1. Pendekatan Sosiologis**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori feminisme struktural fungsional. Teori ini berawal dari teori struktural fungsional yang diterapkan dalam masyarakat modern, dimana pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar. Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan laki-laki dan perempuan bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, maka sistem akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula. Teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama dalam masalah reproduksi. Teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-tengah masyarakat (Nasaruddin Umar, 1999: 53 dalam [staff.uny.ac.id/pdf](http://staff.uny.ac.id/pdf) diakses pada tanggal 26 oktober 2014).

Pendukung utama teori fungsional jender adalah Miriam Johnson (1988, 1989, 1993). Berbicara sebagai teoritis fungsional sebagai feminis, ia pertama mengakui kegagalan fungsionalisme dalam meneliti secara mendalam yang dialami perempuan dalam masyarakat. Posisi sosial utama perempuan dalam struktur keluarga adalah sebagai produsen utama fungsi-fungsi pokok keluarga. Dalam melaksanakan peran tersebut perempuan harus berorientasi ke arah penekanan perasaan kasih sayang (*expressiveness*) dan memengaruhi fungsi mereka dalam seluruh struktur sosial lainnya, terutama ekonomi. Perempuan, misalnya disalurkan ke jenis lapangan pekerjaan yang tergolong memerlukan pengungkapan perasaan kasih sayang, dilapangan pekerjaan yang biasanya didominasi pria, perempuan diharapkan juga mengedepankan perasaan (*expressive*) namun pada waktu bersamaan menerima sanksi karena orientasi ini dan selalu bertanggung jawab terhadap susunan keluarga dan turut dalam partisipasi ekonomi (Ritzer dan Goodman, 2011: 409).

### **1.5.2. Satpol PP Kota Padang**

Keberadaan Satpol PP di Kota Padang disebabkan karena urbanisasi yang dilakukan oleh suatu masyarakat ke kota Padang, dimana urbanisasi merupakan perubahan suatu masyarakat pada kawasan tertentu dari sifat homogeni menjadi masyarakat heterogen, baik disebabkan oleh masyarakat dari kawasan itu sendiri maupun karena pengaruh migrasi dari daerah lain (Hariyono, 2011:93). Perubahan masyarakat suatu kota disebabkan karena kota Padang merupakan kota yang menjadi tujuan kebanyakan orang untuk bermukim dan datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat seperti Batu Sangkar, Padang Panjang, Solok, Bukittinggi dan kota-kota disekitarnya serta daerah-daerah dari luar kota Padang. Kota Padang merupakan kota yang menjadi pusat perdagangan, perkantoran, administrasi, rekreasi, pendidikan dan memiliki fasilitas sarana dan prasarana lengkap yang menjadi daya tarik masyarakat untuk datang.

Hal inilah merupakan salah satu penyebab kota Padang mempunyai masyarakat yang beragam dan juga memiliki berbagai macam permasalahan yang timbul di dalamnya diantaranya permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kota. sehingga kota tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan yang ada, baik masalah yang berdiam di dalamnya, masalah yang timbul dari keadaan fisik kota itu, maupun keadaan atau lokasi kota itu sendiri (Setiadi dan Kolip, 2011 :852-853). Demi menciptakan masyarakat yang tertib , aman dan tentram, pemerintah kota Padang mengeluarkan suatu perundangan yang berupa *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kota Padang* yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Suatu perundangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat. Bila mana tidak ada suatu undang-undang atau kebijakan, maka akan timbul kekacauan di dalam masyarakat (Rijkscroeff, 2001:18). Karena pemerintah yang di dukung oleh banyaknya undang-undang maka peraturan dan kebijakan

ini, pemerintah beranggapan dapat menjamin berhasilnya pengaturan masyarakat (Daldjoeni, 1985:22).

Satpol PP di Kota Padang berdiri pada tahun 1999 dan merupakan instansi yang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap perempuan Tuna Susila dan Penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL), mengamankan pengunjung rasa, pengemis, pengamen, anak jalanan yang beroperasi dilampu merah dan pengamanan fasilitas-fasilitas vital pemerintah daerah Kota Padang. Dengan dikeluarkannya peraturan daerah diatas, maka Pemda Kota Padang menjadikan Satpol PP sebagai instansi yang mengawasi dan menertibkan sesuai Bab VIII Pasal 1 dalam Perda 11/2005 yang berbunyi: "*Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*".

### **1.5.3. Gender dan Pekerjaan**

Pada pembahasan perempuan dan pekerjaan, ada berbagai cara masyarakat dalam menentukan orang-orang untuk peranan pekerjaan menurut jenis kelamin. Murdock dan Provost (1973) telah berusaha mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang paling konsisten untuk feminim yang dapat di jumpai di seluruh dunia. Pekerjaan feminim paling konsisten ialah yang mencakup mengumpul bahan bakar, mempersiapkan minuman, meramu dan menyediakan bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan liar, produksi bahan susu, mencuci, mengambil air dan memasak. Kaum wanita secara ekstensif di seluruh dunia ini terlihat di dalam mengasuh anak dan melakukan kegiatan umum dalam rumah tangga. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang secara konsisten diperuntukkan bagi kaum feminim secara konsisten ialah relatif kurang berbahaya, cenderung lebih bersifat mengulang, tidak memerlukan konsentrasi yang intens, lebih mudah terputus-putus dan kurang memerlukan latihan yang intensif dan keterampilan yang rendah (Parker dan Parker, 1979 dalam Sanderson, 2011: 396).

Pada masyarakat agraris, masalah-masalah ekonomi dan politik secara ketat terorganisasi di bawah kontrol laki-laki dan wanita disisihkan ke dunia pribadi dan rumah tangga. Dalam kebanyakan masyarakat kegiatan kaum wanita sangat ketat diawasi dan sering terdapat perhatian khusus terhadap seksualitas kaum wanita. Singkatnya, status kaum wanita di dalam masyarakat agraris, pada umumnya demikian rendahnya, sehingga diperlakukan seperti orang yang belum dewasa dan yang bergantung. Dunia agrarian adalah dunia yang hampir seluruhnya berpusat pada dan didominasi oleh laki-laki. Pada masyarakat industri juga dicirikan oleh ketidaksamaan yang signifikan di antara kedua jenis kelamin itu, meskipun tidak sama ekstrim dengan yang dijumpai dalam dunia agrarian. Kaum pria khusus mendominasi posisi-posisi berstatus tinggi dalam semua masyarakat industri dan sistem negara industri berada di bawah pengawasan pria. Kaum wanita sangat dibatasi pada pekerjaan-pekerjaan berstatus lebih rendah dan di bayar lebih rendah atau pada sektor rumah tangga dan fungsi-fungsinya (atau keduanya). Kaum wanita masih secara luas dipandang, baik oleh pria maupun wanita sendiri, sebagai pemegang status yang sekunder terhadap kaum pria. Persamaan menurut jenis kelamin tidak terdapat dalam masyarakat industri di dunia ini (Sanderson, 2011: 397-398).

Kedudukan perempuan di ranah publik di lihat dari berbagai penelitian terhadap angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja umumnya mengidentifikasi berbagai bentuk kesenjangan kuantitatif maupun kualitatif dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Moore dan Sinclair (1995) mengidentifikasikan dua macam segregasi jenis kelamin dalam angkatan kerja yaitu segregasi vertikal dan segregasi horizontal. Segregasi vertikal mengacu pada terkonsentrasinya pekerjaan perempuan pada jenjang rendah dalam organisasi, seperti misalnya jabatan pramuniaga, pramusaji, tenaga kebersihan, pramugari, sekretaris, pengasuh anak, guru taman kanak-kanak, perawat, kasir dan sebagainya. Segregasi horizontal, di pihak lain mengacu pada kenyataan bahwa pekerjaan perempuan sering

terkonsentrasi di jenis pekerjaan yang berbeda dengan jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja laki-laki. Adanya segregasi vertikal memberi kesan bahwa dalam tangga jabatan seakan-akan ada sesuatu “langit-langit kaca” (glass ceiling) yang menghalangi mobilitas kaum perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Adanya segregasi horizontal pun memberi kesan seakan-akan dalam pasar kerja ada jenis pekerjaan tertentu yang relatif tertutup bagi kaum perempuan, seperti misalnya di bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi (Sunarto, 2004: 115).

#### 1.5.4. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan ditemukan beberapa skripsi yang relevan dengan penelitian ini, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Penelitian yang Relevan**

<b>Nama</b>	Herlina Oktaviany	Novi Yulianis
<b>Tahun</b>	2004	2005
<b>Judul</b>	Faktor-faktor yang memotivasi perempuan memilih profesi dibidang	Motivasi keterlibatan perempuan untuk terlibat

	jurnalistik.	dalam partai politik di Sumatera Barat
<b>Permasalahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana latar belakang keluarga jurnalis perempuan tersebut?</li> <li>2. Apakah factor-faktor yang mendorong perempuan memilih profesi sebagai jurnalis?</li> <li>3. Bagaimana jurnalis perempuan terlibat dalam organisasi?</li> </ol>	Apa sesungguhnya yang memotivasi perempuan untuk terlibat dalam partai politik khususnya di Sumatera Barat?
<b>Hasil</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan perempuan dalam jurnalis adalah merasa terdiskriminasi dalam pembagian tugas secara fisik dan jenis kelamin.</li> <li>2. adanya ketidakadilan yang mereka dapatkan karena posisi laki-laki lebih dominan baik distruktur manajemen yang mempunyai akses dan kontrol yang menentukan keputusan disurat kabar.</li> <li>3. adanya forum ini bisa meningkatkan kemampuan dan kreativitas jurnalis perempuan</li> </ol>	Motivasi perempuan terlibat dalam partai politik khususnya di Sumatera Barat diantaranya yaitu pengaruh sebagai aktifis dari organisasi mahasiswa yang di ikuti, pengaruh dari keluarga ingin berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan penyalur aspirasi rakyat yang berbeda dari laki-laki dengan sisi keperempuannya.

## 1.6. Metodologi Penelitian

### 1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia, bukan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2008:14). Pendekatan ini berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial. Hal ini dapat menginformasikan penyebab sebuah kejadian adalah respon orang atau kelompok sosial terhadap aksi orang lain atau kelompok sosial lain serta aksi orang lain yang mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan dan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi orang lain dan bagi masyarakat

(Afrizal, 2008:41). Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini, bisa memperlihatkan dan menggambarkan mengenai rekrutmen perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Satpol PP di Kota Padang.

Pendekatan kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa tingkah laku manusia dalam situasi tertentu (Ritzer, 1992: 54). Penggunaan disebabkan beberapa pertimbangan, diantaranya; untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ingin menjabarkan secara lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Kemudian memungkinkan untuk menyajikan suatu topik secara lebih detail dan terperinci, serta dapat meneliti subjek penelitian dalam latar yang alamiah (Herdiansyah, 2011: 15-16). Pendekatan kualitatif memungkinkan penyajian secara lebih detail mengenai rekrutmen perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Satpol PP di Kota Padang.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Tipe deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki yang menggambarkan keadaan subyek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi,2003: 63).

Menurut Whiney dalam Nazir penelitian tipe deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap-sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Adapun tujuan dari penelitian yang bertipe deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena (1998:63-64).

Penelitian dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif ini melihat dan mendengar langsung semua peristiwa yang terjadi di lapangan. Kemudian mencatat selengkap dan seobjektif mungkin peristiwa dan pengalaman yang di dengar dan di lihat. Tipe penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai rekrutmen perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Satpol PP di Kota Padang.

### **1.6.2. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, karena itu diharapkan informan adalah orang yang benar-benar paham dengan segala situasi dan kondisi penelitian dan menguasai permasalahan penelitian (Moleong, 1995: 90). Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya, atau orang lain tentang suatu kejadian (Afrizal, 2005: 65). Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai rekrutmen perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Satpol PP di Kota Padang, maka yang digunakan sebagai informan adalah orang-orang yang berada di perangkat struktur organisasi Satpol PP Kota Padang.

Pemilihan informan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan menggali informasi yang menjadi dasar penulisan laporan (Moleong, 1995: 3). Oleh karena itu, menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan informan secara sengaja) yaitu mewawancarai informan dengan sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keadaan mereka diketahui (Afrizal, 2005:66).

Dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Satpol PP.

2. Kepala Subag Tata Usaha
3. Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (P3HD)
4. Kepala Seksi Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban (Trantib)
5. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas
6. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Untuk validasi data digunakan triangulasi dengan informan triangulasi sebagai berikut:

1. Staff Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (P3HD)
2. Kepala Unit (Kanit) Intel
3. Praja laki-laki di unit Pengendali Masyarakat (Dalmas)
4. Praja perempuan unit Elang
5. Praja perempuan unit Cendrawasih
6. Kasubag ANJAB (Analisis Jabatan) dan PAN (pendayagunaan Aparatur Negara) bagian Organisasi Setda Kota Padang
7. Staff Perundang-undangan bagian Hukum Setda Kota Padang

Informan triangulasi di atas digunakan karena di rasa memiliki pengetahuan serta informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif, dimana jumlah informan tidak ditentukan sejak awal dimulainya penelitian, tetapi setelah penelitian ini selesai. Wawancara dihentikan ketika variasi informan yang diperkirakan tidak ada lagi di lapangan serta data atau informasi yang di peroleh sudah menggambarkan pola dari permasalahan yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, 6 orang terdiri dari informan dan 7 orang sebagai informan triangulasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Informan Penelitian**

No	Nama	Umur	Jabatan
1.	Andree Harmadi	32 tahun	Kepala Satuan PP

	Algamar, SSTP, M.Si		
2.	Rinaldi Kasim, SH	51 tahun	Kasubag Tata Usaha
3.	Irwan	54 tahun	Kasi Pengembangan Kapasitas
4.	Amzarus, SE	51 tahun	Kasi Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban (Trantib)
5.	Fajar Sukma, S.Pd	42 tahun	Kasi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (P3HD)
6.	Yuharisman	51 tahun	Kasi Perlindungan Masyarakat
7.	Yulius Dede	50 tahun	Kepala Unit (Kanit) Intel
8.	Red Maidofa	25 tahun	Anggota Pengendali Masyarakat (Dalmas)
9.	Mutiara Sidiqa S	25 tahun	Staff Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (P3HD)
10.	Septia Aminata	22 tahun	Anggota Unit Elang
11.	Indah Mentari	19 tahun	Anggota Unit Cendrawasih
12	Tuti Kurnia	34 tahun	Kasubag ANJAB (Analisis Jabatan) dan PAN (pendayagunaan Aparatur Negara) bagian Organisasi Setda Kota Padang
13	Susi Ratna Sari	44 tahun	Staff Perundang-undangan bagian Hukum Setda Kota Padang

### 1.6.3. Data yang Diambil

Dalam penelitian ini datanya dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dapat dicari sumber pertama baik dari individu atau perorangan. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan secara mendalam. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung seperti adanya data dari kelurahan, BPS ataupun dari perusahaan itu sendiri, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2001: 42).

Data primer adalah data awal yang di peroleh dari informan utama yang menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi. Seperti yang telah ditentukan informan utama itu adalah orang-orang yang berada di perangkat struktur organisasi Satpol PP. Setelah

memperoleh informasi dari data primer maka untuk lebih mengakuratkan data peneliti menggunakan data sekunder yaitu data pendukung yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, studi kepustakaan, arsip dan dokumentasi Satpol PP, gambaran lokasi penelitian atau dokumentasi mengenai letak geografis wilayah penelitian dan arsip-arsip lain yang dapat menunjang untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini.

#### **1.6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi yang keduanya saling mendukung dan melengkapi. Berdasarkan metode penelitian yang di pakai yaitu penelitian kualitatif maka digunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara:

##### **1. Wawancara**

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dengan cara bertatap muka langsung dengan informan. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi, maksudnya merekonstruksikan orang-orang, kejadian-kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi dan lain-lain (Maleong, 1995 : 135). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur yang dilakukan secara bebas dengan informan yaitu orang-orang yang telah ditentukan untuk menjadi informan.

Wawancara adalah suatu proses yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada informan penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang menunjang dari

pertanyaan penelitian sehingga mendapatkan rumusan-rumusan dan penyelesaian masalah yang diinginkan. Wawancara untuk penelitian yang bersifat kualitatif ini dilakukan *face to face* atau berhadapan langsung dengan narasumber yang dimintai jawabannya untuk mendapatkan data yang akurat dan teruji kebenarannya. Dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih banyak dan data yang diinginkan akan menjadi akurat dan teruji kebenarannya. Wawancara juga salah satu cara mengenal langsung karakter kelompok yang diteliti sehingga mempermudah menyimpulkan hasil wawancaranya.

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara informal antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang (Afrizal, 2008: 97). Wawancara mendalam ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang rekrutmen perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Satpol PP di Kota Padang.

Proses wawancara di lapangan dilakukan pada saat informan tidak dalam keadaan sibuk beraktivitas. Dengan demikian informan dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. ketika wawancara berlangsung pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada informan adalah pertanyaan yang di bahas dalam penelitian ini. Sebelum wawancara, terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dari penelitian supaya berjalan lancar.

Wawancara terhadap informan diawali dengan menanyakan hal-hal yang umum seperti mengenai kehidupan informan, kemudian setelah mendapatkan data dari informan, dilanjutkan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan, pertanyaan dibagi menjadi beberapa bagian yang menjadi landasan penelitian. Pedoman wawancara disusun terlebih dahulu sebelum peneliti terjun ke lokasi penelitian, berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi mengenai pokok-pokok pertanyaan yang ditanyakan kepada informan penelitian, antara lain mengenai rekrutmen perempuan dalam bagian pengawasan dan

pengendalian penertiban umum Satpol PP di Kota Padang. Dalam proses wawancara menggunakan alat bantu yaitu *block note*, alat tulis, *tape recorder* dan kamera. Pada awalnya ada sebagian informan yang sulit memahami pertanyaan penelitian yang disampaikan. Kemudian setelah dijelaskan kembali kepada informan, informan dapat memahami pertanyaan yang ditanyakan dan memberikan penjelasan sesuai pertanyaan yang diberikan dan sebagian informan lainnya dapat memahami pertanyaan penelitian yang disampaikan sehingga proses wawancara pun berjalan lancar.

Ketika wawancara berlangsung hasil wawancara di catat dalam bentuk catatan ringkas dan merekam hasil wawancara yang dilakukan. Setelah wawancara selesai sesampainya di rumah, hasil wawancara tersebut di lihat dan diperdengarkan kembali dan diperluas dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan di catat secara detail dan mengingat kembali segala hal yang tidak tercatat pada catatan lapangan (Spradley, 1997: 95-96).

Untuk menvalid dan mendalami data maka peneliti melakukan triangulasi, triangulasi bukanlah alat atau strategi pembuktian, melainkan suatu alternatif pembuktian. Kombinasi yang dilakukan melalui multi-metode dalam hal bahan-bahan empiris, sudut pandang dan pengamatan yang teratur tampaknya menjadi strategi yang baik untuk menambahkan kekuatan, dan kedalaman suatu penelitian (Salim, 2006: 35). Triangulasi data berfungsi untuk mengecek kevaliditasan data, maka orang-orang yang dimintai informasi juga beragam seperti bapak Dede Kepala Unit (Kanit) Elang, Red sebagai praja laki-laki di unit Pengendali Masyarakat (Dalmas), Septia sebagai praja wanita di unit Elang, Tiara sebagai praja wanita di staff Penindakan Pelanggaran Produk Hukum (P3HD), Indah sebagai praja wanita di unit Cendrawasih, ibu Tuti sebagai Kasubag ANJAB (Analisis Jabatan) dan PAN (pendayagunaan Aparatur Negara) bagian Organisasi Setda Kota Padang dan ibu Susi sebagai Staff Perundang-undangan di bagian Hukum Setda Kota Padang.

## 2. Observasi

Observasi digunakan sebagai metode utama selain wawancara mendalam, untuk mengumpulkan data. Pertimbangan digunakannya teknik ini adalah bahwa apa yang orang katakan, seringkali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Teknik observasi adalah pengamatan langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indera. Dengan observasi kita dapat melihat, dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Teknik observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian. Data observasi data faktual, cermat dan terperinci tentang keadaan lapangan, observasi yang digunakan adalah observasi tidak terlibat yaitu penelitian memberitahu maksud dan tujuan pada kelompok yang diteliti (Ritzer, 1992: 74).

Observasi merupakan metode paling mendasar untuk memperoleh informasi pada dunia sekitarnya. Teknik merupakan pengamatan secara langsung pada suatu objek yang diteliti. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang berusaha menyoroti dan melihat serta mengamati fenomena sosial secara langsung dari setiap aktivitas subyek penelitian. Bentuk observasi yang dilakukan di sini adalah melihat cara kerja perempuan pada saat penertiban. Observasi yang dilakukan pertama kali pada tanggal 27 Juni 2014 jam 11:00 wib adalah melihat dan mengamati cara kerja perempuan pada saat penertiban pengemis di persimpangan jalan veteran dengan menggunakan mobil patroli Satpol PP. Pada saat itu terlihat Satpol PP menemukan pengemis laki-laki tua sedang berdiri di trotoar persimpangan jalan veteran, praja wanita tidak menggunakan seragam praja langsung turun dari mobil patroli dan menemui pengemis laki-laki tua tersebut. Praja wanita memberikan arahan kepada pengemis laki-laki tua itu untuk ikut ke Satpol PP dengan menggunakan mobil patroli kemudian tanpa ada perlawanan bapak itu mengikuti arahan yang disampaikan oleh praja wanita dan mengajak bapak itu ke kantor Satpol PP dengan mobil patroli yang sedang menunggu di persimpangan jalan veteran. Pengemis itu langsung dibawa ke kantor Satpol PP.

Observasi yang kedua pada tanggal 7 Juli 2014 pada pukul 14:20 wib berlangsung ketika mewawancarai salah satu praja wanita di kantor Satpol PP. Saat mewawancarai tiba-tiba praja laki-laki masuk ke ruang penyidik dengan membawa pengemis perempuan tua dan pengemis muda merupakan seorang gadis yang berasal dari Kota Medan yang bernama Tobing. Pada saat itu wawancara dihentikan karena praja wanita yang diwawancarai langsung mengambil bagian yang menjadi tugasnya untuk mewawancarai pengemis itu dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada pengemis. Pada saat diinterogasi oleh praja wanita, pengemis hanya menggaguk dan menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat. Sesekali praja laki-laki ikut dalam interogasi tetapi ketika praja laki-laki yang bertanya kepada pengemis, pengemis hanya diam saja. Dalam mengamati situasi dan aktifitas praja wanita, dapat di lihat bahwa cara kerja perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Satpol PP Kota Padang bertugas menangani penertiban pengemis, yaitu praja wanita yang menangkap, membawa keatas mobil dan menginterogasi di kantor Satpol PP.

Kemudian observasi yang ketiga dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2014 pada pukul 13:40 wib adalah pada saat penertiban gabungan Satpol PP yang bekerja sama dengan Polisi, TNI, Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Kesbangpol kota Padang dan lain-lain. Informasi penertiban gabungan ini di dapat dari teman yang seorang praja laki-laki yang bernama Red Maidofa di unit Pengendali Masyarakat (Dalmas). Penertiban gabungan ini dilakukan untuk menertibkan payung ceper yang ada di Pantai Cimpago. Setelah mendapatkan informasi, langsung menuju ke pantai Cimpago dan menunggu kedatangan Satpol PP disana, setelah menunggu beberapa menit belum terlihat kedatangan dari Satpol PP sehingga menanyakan kembali alasan belum datangnya Satpol PP kepada praja laki-laki tadi. Kemudian setelah diberitahu bahwa sebelum dilakukan penertiban gabungan semua dinas yang ikut terlebih dahulu apel gabungan di kantor Camat Padang Barat. Setelah

mendapatkan informasi tersebut langsung menuju kantor Camat Padang Barat. Pada saat itu dapat di lihat semua Polisi, TNI, Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Kesbangpol kota Padang dan lain-lain yang ikut dalam penertiban gabungan sedang berbaris dan mendengar arahan dari petinggi polisi, termasuk praja wanita. Setelah arahan yang diberikan, semua unit yang tergabung dalam penertiban langsung menuju pantai Cimpago dan peneliti juga mengikutinya. Pada saat sampai di pantai Cimpago, personil polisi dan dinas perhubungan yang ikut dalam penertiban mengamankan jalan dan melarang mobil maupun motor untuk melewati daerah tersebut, kemudian dari Satpol PP dengan pamong praja laki-lakinya langsung membongkar payung ceper yang melanggar aturan yang ada. Saat itu wartawan dari berbagai media datang dan mengambil foto pembongkaran yang terjadi dan masyarakat setempat hanya melihat dari jauh pembongkaran tersebut. Pada saat pembongkaran, praja laki-laki mengintruksikan tugas kepada praja perempuan untuk berbicara kepada ibu-ibu pemilik payung ceper untuk tidak mendirikan payung lagi setelah pembongkaran dilakukan. Saat tugas itu dilakukan sebagian ibu-ibu pemilik payung ceper mendengarkan arahan yang diberikan dan mengikuti arahan tersebut untuk tidak mendirikan payung ceper lagi. Pada saat memberikan arahan ke salah satu ibu-ibu pemilik payung ceper yang lain, praja wanita langsung mendapatkan makian tetapi tidak memberikan perlawanan. Namun pembongkaran itu tetap dilakukan dan praja perempuan tetap memberikan pemberitahuan kepada ibu-ibu pemilik payung ceper lainnya. Peneliti melihat bahwasanya cara kerja perempuan dalam penertiban gabungan itu adalah memberikan pemberitahuan larangan mendirikan payung ceper di Pantai Cimpago kepada ibu-ibu pemilih payung ceper.

Proses pengumpulan data di mulai pada bulan Desember karena pada saat itu tertarik untuk melakukan penelitian mengenai rekrutmen perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Satpol PP di Kota Padang sehingga mencari data mengenai jumlah perempuan yang terlibat di Satpol PP. Setelah melakukan diskusi dengan

pembimbing, pada bulan Januari peneliti memasukan Tor Proposal penelitian ke jurusan. Pada bulan Januari juga SK pembimbing keluar. Setelah itu berkonsultasi dengan pembimbing mengenai topik penelitian. Pada saat itu pembimbing memberikan banyak saran untuk kesempurnaan dalam penelitian.

Setelah melakukan perbaikan akhirnya pada tanggal 30 April 2014 ujian seminar proposal dilakukan. Kritik dan saran dari tim penguji juga sangat mendukung. Penelitian pun dilakukan setelah selesai memperbaiki proposal berdasarkan saran-saran dari tim penguji. Pada tanggal 2 Juni 2014 langsung turun ke lapangan yaitu di Kantor Satpol PP. Untuk tahap pertama yang dilakukan adalah mencari keberadaan ruang kerja dan bapak Kasi dan Kepala Satpol PP yang akan diwawancarai kepada praja laki-laki yang bertugas di kantor Satpol PP. Pada saat itu sambutan dari praja laki-laki yang bertugas pada saat itu sangat baik, dia juga menjelaskan letak ruangan dan waktu, keberadaan bapak Kasi dan Kepala Satuan Satpol PP tersebut.

Berdasarkan letak ruangan, waktu dan keberadaan informan yang didapatkan dari praja laki-laki yang bertugas sebagai Provost di luar kantor, kemudian langsung menuju ruangan setiap Kasi dan berharap informan ada diruangan masing-masing. Setelah melihat keruangan, tidak semua informan yang berada di kantor Satpol PP sehingga hanya mewawancarai informan yang masih berada di kantor dan dilanjutkan di lain hari ketika informan bersedia diwawancarai.

Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan adalah untuk mencari data mengenai rekrutmen perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Satpol PP di Kota Padang kepada informan. Terlebih dahulu meminta kesediaan informan untuk diwawancarai. Setelah itu proses wawancara pun berlangsung. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara berjalan bebas dan tidak terstruktur sesuai dengan urutan yang telah ditentukan

mengenai rekrutmen perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Satpol PP di Kota Padang.

Pelaksanaan wawancara dilakukan di tempat informan bekerja kemudian wawancara dilakukan pada waktu yang tidak bisa ditentukan karena harus menyesuaikan kesediaan waktu informan yang ingin diwawancarai. Kendala yang ditemukan saat melakukan penelitian adalah pada awalnya ada beberapa informan yang kurang memahami pertanyaan penelitian yang ditanyakan tapi setelah dijelaskan kembali informan dapat memahami pertanyaan penelitian yang ditanyakan.

#### **1.6.5. Unit Analisis**

Dalam suatu penelitian unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu dan kelompok. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah kelompok, yaitu orang-orang yang berada di Perangkat Struktur Organisasi Satpol PP Kota Padang.

#### **1.6.6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas-aktivitas seorang, dengan mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok data tersebut (Afrizal, 2008: 80). Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data. Data dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan model Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu data yang di peroleh dari lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian di reduksi, di rangkum dan memilah hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting kemudian di cari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pelabelan).

2. Penyajian data, yaitu dalam penelitian kualitatif dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Selain itu juga dapat menggunakan bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat dan sejenisnya.
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi), yaitu penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh bukti-bukti yang valid dan kredibel sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif (Miles dan Huberman, 1984: 15-21 dalam [www.damandiri.or.id](http://www.damandiri.or.id) di akses 5 Oktober 2014)

Proses analisis di mulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, wawancara dan di dukung oleh data sekunder yang di peroleh melalui studi kepustakaan yaitu berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, arsip dan skripsi. Kemudian data tersebut di susun secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang pengamatan yang akhirnya memberi kesimpulan dari penelitian tersebut. Data yang belum jelas kemudian dilacak kembali ke sumber data yang relevan. Tafsiran atau interpretasi data artinya memberi makna pada analisis, menjelaskan pola dan kategori dan hubungan berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan pandangan selama dilapangan.

Data yang ingin didapatkan di lapangan adalah mengenai rekrutmen perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Satpol PP di Kota Padang. Kemudian data yang di peroleh dari hasil pengamatan maupun hasil wawancara yang di catat pada catatan lapangan, dikumpulkan dan dipelajari sebagai kesatuan yang utuh yang kemudian baru di analisis secara kualitatif, berdasarkan kemampuan dan interpretasi peneliti dengan dukungan data primer dan data sekunder yang berdasarkan teori yang telah dipelajari.

#### **1.6.7. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di kantor Satpol PP Kota Padang Sumatera Barat. Penelitian dilakukan di lokasi ini karena adanya perempuan yang di rekrut dalam bagian pengawasan dan pengendalian ketertiban umum Kota Padang di lapangan.

### **1.6.8. Definisi Operasional Konsep**

#### **1. Rekrutmen**

Merupakan pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status (kedudukan).

#### **2. Pelaksanaan Tugas Pengamanan Dan Pengendalian Penertiban Umum**

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bagian ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP yang langsung menangani pelaksanaan Perda 11/2005 di lapangan seperti penertiban perempuan Tuna Susila, Pedagang Kaki Lima (PKL), pengunjung rasa, pengemis, pengamen, anak jalanan yang beroperasi di lampu merah dan pengamanan fasilitas-fasilitas vital pemerintah daerah Kota Padang.

#### **3. Satpol PP Kota Padang**

Merupakan instansi yang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap perempuan Tuna Susila dan Penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL), mengamankan pengunjung rasa, pengemis, pengamen, anak jalanan yang beroperasi di lampu merah dan pengamanan fasilitas-fasilitas vital pemerintah daerah Kota Padang sesuai Perda No.11 Tahun 2005.

### 1.6.9. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini di buat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (Skripsi) sesuai dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 1.6**  
**Jadwal Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	2014						
		April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
1.	Seminar proposal	■						
2.	Perbaikan proposal		■					
3.	Pengurusan surat izin penelitian		■					
4.	Penelitian			■	■	■	■	
5.	Analisis Data				■	■	■	
6.	Bimbingan Skripsi					■	■	
7.	Ujian Skripsi						■	■